

# **KINERJA DEWAN KERAJINAN NASIONAL DAERAH DALAM PEMBINAAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH DI KOTA PONTIANAK**

Oleh:  
**ROPINUS**  
NIM. E01110012

Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Tanjungpura Pontianak Tahun 2016

*Email: [Ropgen@gmail.com](mailto:Ropgen@gmail.com)*

## **Abstrak**

Dekrnasda belum optimal memberikan pembinaan UMKM sehingga Dekranasda hanya menjadi tempat penitipan produk bukan pelaku pembinaan, sedangkan pembinaan UMKM dilakukan Disperindagkop & UKM. Belum optimal kinerja ini disebabkan pengurus Dekranasda memiliki tugas pokok baik sebagai PNS dan pelaku UMKM mengakibatkan belum optimalnya dalam melaksanakan fungsinya sebagai pengurus Dekranasda Kota Pontianak. Pada penelitian ini, peneliti ingin mengetahui kinerja Dekranasda dalam pembinaan UMKM di Kota Pontianak dengan menggunakan penilaian kinerja organisasi dengan menggunakan 3 (tiga) indikator menurut Dwiyanto (Pasolong, 2010:178) yaitu: Produktivitas, Responsivitas dan Akuntabilitas. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan analisis data secara kualitatif. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa Produktivitas Dekranasda Kota Pontianak dalam pembinaan belum optimal. Hal ini terlihat dari target-target yang telah ditetapkan oleh Dekranasda Kota Pontianak belum tercapai secara optimal. Responsivitas Dekranasda Kota Pontianak dalam pembinaan UMKM disimpulkan belum baik, rendahnya pemahaman untuk dan bagaimana cara menyampaikan aspirasi kepada Dekranasda. Akuntabilitas Dekranasda Kota Pontianak cukup baik, walaupun belum adanya anggaran dana tetap dari pemerintah namun setiap bantuan dapat dipertanggungjawabkan. Sedangkan saran untuk penelitian adalah meningkatkan produktivitas, pengurus mengoptimalkan SDM yang dimiliki untuk mendata UMKM dan memberikan pembinaan kepada pelaku UMKM sehingga terwujud tujuan dan tercapainya produktivitas. Untuk mendapatkan kepercayaan dari pelaku UMKM maka sikap responsivitas perlu ditingkatkan terutama pelaku yang mempunyai kendala, Dekranasda memberikan penyuluhan kepada pelaku UMKM cara menyampaikan permasalahan kepada Dekranasda. Untuk meningkatkan kinerja Dekranasda dalam pembinaan UMKM di Kota Pontianak perlu anggaran dana dari pemerintah.

Kata-Kata Kunci: Kinerja, Pembinaan dan UMKM

## **Abstrack**

Dekranasda (Regional National Craft Council) has not been optimal in fostering small and middle micro enterprises. It is becoming a place where the enterprises put their product to be sold. In it industry, trade and cooperative and small and middle enterprises that foster the small and middle enterprises. Non optimal performance is due to dual main duties that the administrators of that council both as civil servant and as the enterpreneur. This study investigates Regional National Craft Council performance in giving guidance to small and middle micro enterprises in Pontianak. This performance was rated using organization performance indicators that is productivity, responsivity, and accountability (Pasolong, 2010:178). It is a descriptive study using qualitative data analysis. The result shows that Regional National Craft Council productivity has not been optimal yet. It can be seen from non-optimal achievement of the target determined by Regional National Craft Council of Pontianak City. The responsiveness of Regional National Craft Council of Pontianak City to cultivate the enterprises is not good as well. Low understanding to and how to expres their aspirations to the council is one of the couse. Nevertheless the council has good accountability. Any financial assistance is accountable although there is not static budget from the government. It is suggested that to in order to increase the productivity, the council administrators should empowerits human resources maximally tp data and guide the small and middle micro business, the council needs to be more responsive,especially to those who had problems. Also, it is necessary to have routine budget. They need to teach to the entrepreneurs on how to express complain

to the council. Moreover, government should grant some budget to the council so that they can improve their performance.

*Keywords : Performance , Development and UMKM*

## A. PENDAHULUAN

Kota Pontianak memiliki potensi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) cukup banyak, perlu dioptimalkan dengan pembinaan yang baik ditengah melemahnya perekonomian. Dampak pelemahan perekonomian berimbas kesemua sektor kehidupan, disaat kondisi ekonomi nasional dan daerah yang tidak stabil, UMKM mampu memberi jawaban riil dengan tetap terjaga eksistensinya. Karena produk UMKM tidak tergantung pada luar negeri, kebutuhan akan bahan pokok UMKM hampir bisa dipenuhi dari dalam negeri sendiri.

Besarnya kontribusi UMKM bagi perekonomian nasional dan daerah, sektor UMKM perlu mendapat dukungan semua pihak dalam pembinaan. Dekranasda memiliki peranan pembinaan sektor UMKM perlu dioptimalkan kinerjanya, sehingga produk mempunyai daya saing harga dan kualitas di pasaran. UMKM sebagai roda penggerak ekonomi masyarakat perlu terus digerakkan untuk menjadi pilar ekonomi masyarakat Kota Pontianak. Melambatnya perekonomian nasional mengakibatkan banyak

perusahaan-perusahaan skala sedang dan besar terdampak pengurangan pendapatan, pengurangan karyawan, dan pengurangan sifit kerja akan tetapi pelaku sektor UMKM mampu bertahan dan bahkan menjadi sumber peluang untuk bisa memperoleh devisa negara sebagai bahan ekspor dari Non migas.

Dasar hukum Dewan Kerajinan Nasional adalah Keputusan Menteri Dalam Negara Nomor : 537/5038/Sospol, tanggal 15 Desember 1981, pada tingkat daerah berdiri Dewan Kerajinan Nasional Daerah dibentuknya Dekranasda dalam upaya menggali potensi kerajinan dari setiap daerah di seluruh wilayah Indonesia, maka Dekranasda dibentuk disetiap Provinsi, Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia. Kepengurusan Dekranasda tingkat Provinsi dilantik oleh Ketua Dewan Kerajinan Nasional (Dekranas), Pengurusan Dekranasda Kabupaten/Kota dikukuhkan Ketua Dekranasda Provinsi atas usulan daerah. Kepengurusan Dekranasda langsung dipimpin istri Gubernur, Walikota/Bupati. Kepengurus Dekranasda terdiri dari PNS di lingkungan SKPD serta pelaku UMKM kerajinan di Kota Pontianak, kepengurusan Dekranasda

dibentuk sesuai kebutuhan dan tujuan organisasi. Dekranasda Kota Pontianak bagian dari mitra pendukung Pemerintahan Kota Pontianak, terkhusus memperhatikan potensi kerajinan yang ada di daerah.

## B. KAJIAN TEORI

Pembinaan merupakan totalitas kegiatan yang meliputi perencanaan, pengaturan dan penggunaan SDM sehingga menjadi SDM yang mampu mengemban tugas menurut bidangnya masing-masing, supaya dapat mencapai prestasi kerja yang efektif dan efisien. Pembinaan juga dapat diartikan sebagai suatu tindakan, proses, hasil atau pernyataan lebih baik.

Usaha pembinaan merupakan persoalan yang normatif yakni menjelaskan mengenai bagaimana perubahan dan pembaharuan dalam pembinaan. Miftah Thoah (1997:16-17). dalam bukunya yang berjudul "*Pembinaan Organisasi*" mendefinisikan, pengertian pembinaan bahwa :

1. Pembinaan adalah suatu tindakan, proses, atau pernyataan menjadi lebih baik.
2. Pembinaan merupakan suatu strategi yang unik dari suatu sistem pembaharuan dan perubahan (change).

3. Pembinaan merupakan suatu pernyataan yang normatif, yakni menjelaskan bagaimana perubahan dan pembaharuan yang berencana serta pelaksanaannya.
4. Pembinaan berusaha untuk mencapai efektivitas, efisiensi dalam suatu perubahan dan pembaharuan yang dilakukan tanpa mengenal berhenti.

Menurut Pasal 16-20, Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2008, Pembinaan UMKM adalah mengenai ruang lingkup pembinaan dan pengembangan meliputi Bidang Produksi, Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia dan Teknologi.

*Pertama*, bidang produksi adalah identifikasi potensi dan masalah yang dihadapi oleh usaha kecil, penyiapan program pembinaan dan pengembangan sesuai potensi dan masalah yang dihadapi oleh usaha kecil, pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan melaksanakan pemantauan dan pengendalian pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan bagi usaha kecil.

*Kedua*, bidang pengolahan adalah meningkatkan kemampuan manajemen serta teknis produksi dan pengolahan, meningkatkan kemampuan rancang bangun dan perekayasaan, memberikan kemudahan dalam pengadaan sarana dan prasarana produksi dan pengolahan, bahan baku, bahan penolong dan kemasan,

menyediakan tenaga konsultan profesional di bidang produksi dan pengolahan.

*Ketiga*, bidang pemasaran adalah melaksanakan penelitian dan pengkajian pemasaran, meningkatkan kemampuan manajemen dan teknik pemasaran, menyediakan sarana serta dukungan promosi dan uji coba pasar, mengembangkan lembaga pemasaran dan jaringan distribusi, memasarkan produk usaha kecil, menyediakan tenaga konsultan profesional di bidang pemasaran, menyediakan rumah dagang dan promosi usaha kecil, memberikan peluang pasar.

*Keempat*, bidang sumber daya manusia adalah memasyarakatkan dan membudayakan kewirausahaan, meningkatkan ketrampilan teknis dan manajerial, membentuk dan mengembangkan lembaga pendidikan, pelatihan dan konsultasi usaha kecil, menyediakan tenaga penyuluh dan konsultan usaha kecil, menyediakan modul manajemen usaha kecil, menyediakan tempat magang, studi banding, dan konsultasi untuk usaha kecil.

*Kelima*, bidang teknologi adalah meningkatkan kemampuan di bidang teknologi produksi dan pengendalian mutu, meningkatkan kemampuan di bidang penelitian untuk mengembangkan desain dan teknologi baru, memberikan insentif kepada usaha kecil yang menerapkan teknologi baru dan melestarikan

lingkungan hidup, meningkatkan kerjasama dan alih teknologi.

Kriteria disetiap negara berbeda tentang kriteria UMKM, Namun di Indonesia sesuai dengan Pasal 6, Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang UMKM, kriteria UMKM didefinisikan sebagai berikut:

1. Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang/perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.
2. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang/perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan/bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.
3. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan

sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.

Berdasarkan kekayaan dan hasil penjualan, Menurut Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2008 pasal 6, kriteria usaha mikro yaitu:

1. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
2. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Kriteria usaha kecil adalah sebagai berikut:

1. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta) sampai paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
2. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,00 ( tiga ratus juta rupiah) sampai paling banyak Rp.2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

Sedangkan kriteria usaha menengah adalah sebagai berikut:

1. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau

2. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh milyar rupiah).

Menurut pendapat Hill;Sandee & Wengel, (dalam Margono & Kusumasari, 2015:2-3).Kebijakan untuk mengembangkan UKM dapat dikelompokkan kedalam tiga jenis: kebijakan finansial, kebijakan bantuan teknis dan regulasi (Hill, 2001.p250). *Pertama*, kebijakan bantuan finansial menyangkut pemberian subsidi, kredit, persyaratan bahwa Bank wajib mengalokasikan sejumlah persentase tertentu dari portofolio mereka untuk membantu usaha kecil. *Kedua*, bantuan teknis yang berhubungan dengan pemberian training, penyuluhan, dan advokasi pemasaran. *Ketiga*, regulasi yang bersangkutan dengan berbagai kebijakan dengan tujuan. usaha kecil yang mandiri adalah usaha kecil yang memiliki kemampuan memecahkan masalah dengan bertumpu pada kepercayaan dan kemampuan sendiri tanpa tergantung pada pihak lain.

Bagi setiap organisasi penilaian terhadap kinerja merupakan suatu hal yang sangat penting untuk mengetahui sejauh mana tujuan dari organisasi berhasil diwujudkan dalam jangka waktu atau periode tertentu. Secara umum kinerja

adalah perpaduan dengan kata “*performence*”. Konsep kinerja didefinisikan sebagai pencapaian hasil atau *the degree of accomplishment* dalam rangka pencapaian tujuan organisasi atau instansi (Keban 2005:1). Dengan kata lain, kinerja merupakan tingkat pencapaian tujuan organisasi.

Berdasarkan pendapat diatas dijelaskan bahwa kinerja berhubungan dengan bagaimana melakukan suatu pekerjaan dan menyempurnakan hasil pekerjaan berdasarkan tanggungjawab namun tetap harus mentaati segala peraturan – peraturan moral maupun etika. Lebih jauh lagi terlihat nilai kinerja tidak hanya terbatas pada organisasi tetapi budaya organisasi dan kualitas sumber daya manusia yang dimiliki organisasi dan kepemimpinan yang efektif. Kesiapan dan keterampilan seseorang tidaklah cukup efektif untuk mengerjakan sesuatu tanpa pemahaman yang jelas tentang apa yang akan dikerjakan dan bagaimana mengerjakannya. Kinerja merupakan perilaku nyata yang ditampilkan melalui pola kerja untuk pencapaian tujuan Dekranasda dalam mengeksplorasi kerajinan di Kota Pontianak.

Pengukuran kinerja organisasi publik, Menurut Dwiyanto (dalam Pasolong, 2010:178) ada lima indikator yaitu: 1. Produktifitas 2. Isu Kualitas Pelayanan, 3. Responsivitas 4.

Responsibilitas dan 5. Akuntabilitas sebagai berikut penjelasannya:

*Pertama*, Produktifitas konsep tidak hanya mengukur efesiensi, tetapi juga efektivitas pelayanan, produktifitas pada lainnya difahami sebagai rasio antara input dan output.

*Kedua*, isu kualitas pelayanan cenderung lebih penting dalam menjelaskan ukuran kinerja organisasi publik. Informasi mengenai kepuasan terhadap kualitas pelayanan publik lebih mudah diperoleh dari media massa dan diskusi publik yang sifatnya mudah dan murah.

*Ketiga*, Responsivitas adalah kemampuan organisasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda prioritas pembinaan dan mengembangkan program- program pembinaan sesuai kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

*Keempat*, Responsibilitas pelaksanaan kegiatan organisasi itu dilakukan harus sesuai dengan kebijakan organisasi, baik yang eksplisit maupun inplisit.

*Kelima*, Akuntabilitas konsep akuntabilitas publik dapat digunakan untuk melihat seberapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi publik itu konsisten dengan kehendak kebutuhan masyarakat.

Manajemen berbasis kinerja juga memerlukan alat yang di sebut dengan pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja

digunakan sebagai dasar untuk melakukan penilaian kinerja, yaitu untuk menilai sukses atau tidaknya suatu organisasi, program, atau kegiatan yang dilakukan. Menurut Mahmudi (2007:6) juga menyebutkan pengukuran kinerja paling tidak mencakup 3 (tiga) variabel penting yang harus dipertimbangkan, yaitu: perilaku (proses), *output* ( produk langsung suatu aktivitas/program), dan *outcome* (dampak aktivitas/ program).

Pengukuran kinerja sangat penting dalam rangka pencapaian kinerja organisasi yang telah ditetapkan sesuai dengan misi organisasi. Kinerja organisasi yang dikemukakan oleh Bastian ( dalam Tangkilisan, 2005:175) adalah berbagai gambaran mengenai tingkat organisasi, dalam upaya mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan misi organisasi tersebut. Sedangkan menurut Mahmudi (2007:21) bahwa kinerja organisasi pada dasarnya menjadi tanggungjawab setiap pegawai yang ada didalam organisasi tersebut. Jika dalam organisasi tiap-tiap pegawai kerja yang baik, prestasi, bersemangat, dan dapat memberikan kontribusi terbaik terhadap organisasi tersebut, maka kinerja organisasi secara keseluruhan dapat dikatakan baik.

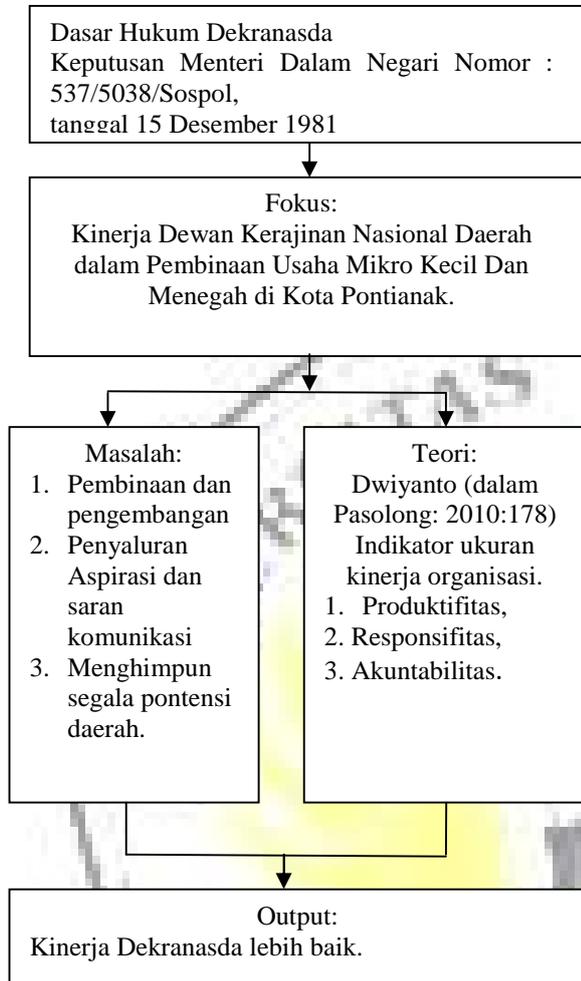
Berangkat dari beberapa pendapat pakar di atas,dapat ditegaskan bahwa kinerja adalah hasil karya yang dicapai oleh organisasi, sesuai dengan wewenang

dan tanggungjawab atau sebagai gambaran mengenai tentang besar kecilnya hasil yang dicapai dari suatu kegiatan baik dilihat secara kualitas maupun kuantitas sesuai dengan visi dan misi organisasi tersebut. Dengan demikian perlu kiranya menilai kinerja dari Dekranasda Kota Pontianak sebagai suatu organisasi publik mempunyai wewenang terhadap pembinaan UMKM yang ada di Kota Pontianak. Dengan ini harapan mampu menjawab apa yang menjadi tujuan apakah Dekranasda melakukan pembinaan secara optimal terhadap UMKM di Kota Pontianak.

Kinerja dalam organisasi publik dapat diukur apakah sebuah kinerja tersebut optimal atau tidak optimal. Kinerja Dekranasda sebagai organisasi publik dapat dilihat dari kuantitas dan kualitas yang dikerjakan dan ketepatan waktu yang telah disepakati oleh organisasi sesuai dengan visi dan misi dari organisasi. Berdasarkan *riview* literatur ditemukan adanya beberapa indikator penyusunan kinerja. Indikator – indikator ini sangat bervariasi sesuai dengan fokus dan konteks penelitian yang dilakukan dalam proses penemuan dan penggunaan indikator tersebut.

## Gambar Alur Pikir Penelitian

Berikut adalah kerangka pikir penelitian dalam penelitian ini :



## C. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan analisis data secara kualitatif. Artinya penulis mencoba menggambarkan fakta yang terjadi sekarang sebagai realistik natural tanpa adanya fenomena yang dibuat-buat yaitu mendeskripsikan kegiatan atau kinerja Dekranasda dalam pembinaan Unit Mikro

Kecil dan Menengah. Kemudian bagaimana keberadaannya yang ada kaitannya dengan kinerja Dekranasda. Sehingga penelitian lebih berorientasi pada keadaan yang benar-benar nyata terjadi dilapangan secara menyeluruh, luas dan mendalam. Kemudian, data yang diperoleh akan mendeskripsikan melalui kata. Penelitian jenis Kualitatif deskriptif dianggap yang paling tepat untuk penelitian ini karena untuk melihat fenomena apa saja yang telah dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi tindakan dan lain-lainnya secara menyeluruh.

Teknik yang digunakan peneliti dalam pengumpulan data ada tiga. Adapun teknik tersebut:

### 1. Wawancara

Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik wawancara tidak terstruktur. Adapun wawancara menurut Moleong (2013:191) wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bersifat jauh lebih bebas iramannya yaitu pertanyaan biasanya tidak disusun terlebih dahulu, melainkan disesuaikan dengan keadaan dan pelaksanaan tanya jawab mengalir seperti percakapan sehari-hari.

Pada saat melakukan wawancara dengan teknik wawancara tidak terstruktur, ada hal yang harus diperhatikan oleh peneliti. Adapun hal itu adalah peneliti

harus memperhatikan arah pembicaraan sehingga harus memiliki arah pembicaraan yang jelas dengan tujuan awal dari wawancara. Hal ini dilakukan agar peneliti tidak terbawa arus pembicaraan yang tidak relevan dengan tujuan awal wawancara. Oleh karena itu, peneliti perlu membuat pertanyaan dasar yang menjadi acuan dalam proses wawancara.

## **2. Catatan Lapangan**

Langkah-langkah penulisan catatan lapangan dalam penelitian ini ada tiga langkah. Adapun langkah-langkahnya adalah sebagai berikut.

- a. Pencatatan awal yaitu pencatatan yang dilakukan sewaktu berada di latar penelitian dengan jalan menuliskan hanya kata-kata kunci saja pada buku nota.
- b. Pembuatan catatan lapangan lengkap setelah kembali ke tempat tinggal. Tahapan ini dilakukan dalam suasana tenang, tidak ada gangguan. Hasilnya sudah berupa catatan lapangan lengkap.
- c. Sewaktu ke lapangan penelitian, kemudian teringat bahwa masih ada yang belum dicatat dan dimasukkan dalam catatan lapangan, dan hal tersebut harus dimasukkan.

## **3. Perekaman**

Teknik lain yang digunakan peneliti dalam pengumpulan data penelitian ini adalah teknik perekaman. Teknik perekaman digunakan peneliti

untuk merekam Kinerja Dekransda dalam pembinaan UMKM di Kota Pontianak. Teknik ini digunakan agar mempermudah peneliti dalam pentranskripsian kinerja karena dalam hal ini peneliti bisa saja lupa. Jika demikian, maka peneliti bisa menanggulangi hal tersebut dengan memutar ulang hasil rekaman tersebut. Proses perekaman dilakukan peneliti ketika peneliti melakukan wawancara dengan narasumber dan ketika peneliti melakukan observasi.

## **D. PEMBAHASAN**

Pengukuran kinerja merupakan suatu kegiatan yang sangat penting karena dapat digunakan sebagai tolak ukur keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuannya. Organisasi pelayanan publik dalam mengukur kinerja sangat berguna untuk menilai seberapa jauh kinerja yang diberikan organisasi tersebut, sehingga sesuai dengan harapan dan dapat memuaskan masyarakat. Dengan melakukan pengukuran kinerja, maka upaya untuk memperbaiki kinerja bisa dilakukan secara lebih terarah dan sistematis.

Kinerja Dekranasda Kota Pontianak perlu diukur dalam memberikan pembinaan UMKM di Kota Pontianak. Pada Penelitian Kinerja Dekranasda,

diperlukan alat pengukur kinerja, peneliti menggunakan pengukuran kinerja menurut pendapat Dwiyanto (dalam Pasolong: 2010:178) ada lima indikator sebagai alat ukuran kinerja organisasi yaitu: 1. Produktifitas, 2. Isu Kualitas Pelayanan, 3. Responsivitas 4. Responsibilitas dan 5. Akuntabilitas. Namun peneliti menggunakan 3 indikator yaitu; 1. Produktifitas, 2. Resposivitas, dan 3. Akuntabilitas. Lebih lanjut dijelaskan sebagai berikut:

### **1. Indikator Produktivitas**

Konsep produktivitas pada umumnya dipahami sebagai rasio antara input dan output, artinya sejauh mana upaya yang dilakukan dengan hasil yang diperolehnya dalam periode tertentu. Namun konsep produktivitas diperluas dengan seberapa besar pelayanan publik itu memiliki hasil yang diharapkan sebagai salah satu indikator kinerja penting. Pada penelitian ini, konsep produktivitas ditekankan pada sejauh mana upaya yang dilakukan Dekranasda dalam pembinaan UMKM di Kota Pontianak dan apakah hasilnya sesuai dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya. Kesesuaian antara hasil yang diperoleh dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya melalui berbagai kegiatan atau program yang dilakukan oleh Dekranasda. Penjelasan lebih lanjut adalah sebagai berikut:

Produktivitas menunjuk pada kegiatan membandingkan antara hasil yang sebenarnya diperoleh di lapangan dengan target yang telah ditetapkan. Sasaran yang ingin dicapai organisasi diteliti. Demikian pula produktivitas di Dekranasda dapat dilihat dengan cara membandingkan antara hasil yang diperoleh dilapangan dengan target yang telah ditetapkan oleh Dekranasda dalam pembinaan UMKM di Kota Pontianak.

Perbandingan target yang ingin dicapai dalam pembinaan UMKM dan realisasi adalah ukuran kinerja Dekranasda Kota Pontianak, jumlah UMKM yang dibina Dekranasda berjumlah 18 dari Target 66 UMKM.

Berdasarkan pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa pencapaian target yang telah ditetapkan Dekranasda belum optimal, target berjumlah 66 UMKM namun, pada realisasi hanya berjumlah 18 UMKM. Berdasarkan jumlah pencapaian target dapat dilihat masih rendahnya kinerja Dekranasda dalam upaya mencapai tujuan organisasi.

### **2. Indikator Responsivitas**

Responsivitas merupakan kemampuan organisasi untuk mengenali kebutuhan pelaku UMKM, menyusun agenda dan prioritas pembinaan dan mengembangkan program-program sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi UMKM.

Organisasi yang memiliki responsivitas rendah dengan sendirinya memiliki kinerja yang rendah pula. Responsivitas dimasukkan sebagai salah satu indikator kinerja karena responsivitas menggambarkan kemampuan organisasi Dekranasda Kota Pontianak memberikan solusi terhadap aspirasi. Responsivitas Dekranasda diukur dari tingkat penanganan atas keluhan dan tuntutan masyarakat pelaku usaha terhadap pembinaan UMKM.

Kemampuan pengurus Dekransda dalam merespon dan memberikan solusi kepada pelaku UMKM belum optimal, disebabkan faktor internal belum siap melaksanakan tugas dari Dekranasda secara optimal karena organisasi belum berjalan sebagaimana tugas dan fungsinya. Pengurus belum fokus mengelola Dekranasda dengan baik, sehingga aspirasi yang diterima ditindaklanjuti dengan program dari Disperindag & UKM karena belum terealisasinya program dari Dekranasda.

Aspirasi yang diterima berkaitan dengan kebutuhan UMKM dalam upaya meningkatkan kualitas produknya, pembinaan yang dimaksud adalah pembinaan dalam pengolahan produk baik dan benar, sertifikasi SNI, sertifikasi halal dan kemasan produk, bantuan modal dan promosi melalui kegiatan baik ditingkat daerah maupun nasional.

Berdasarkan apa yang diungkapkan diatas, kinerja Dekransda dalam merespon dan memberikan solusi kepada pelaku UMKM belum optimal, disebabkan faktor internal belum siap melaksanakan tugas dari Dekranasda secara optimal karena organisasi belum berjalan sebagaimana tugas dan fungsinya. Pengurus belum fokus mengelola Dekranasda dengan baik, sehingga aspirasi yang diterima ditindaklanjuti dengan program dari Disperindag & UKM karena belum terealisasinya program dari Dekranasda.

### **3. Indikator Akuntabilitas**

Akuntabilitas dalam penelitian ini menekankan pada seberapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi publik tunduk pada pejabat politik yang dipilih oleh rakyat. Asumsinya adalah bahwa para pejabat politik yang telah dipilih oleh rakyat akan selalu mengedepankan kepentingan rakyat. Dengan demikian, konsep akuntabilitas publik dapat digunakan untuk mengetahui seberapa jauh kebijakan dan kegiatan organisasi publik tersebut sejalan dengan kehendak masyarakat publik. Kinerja organisasi publik tidak hanya dapat dilihat dari ukuran internal yang dikembangkan oleh organisasi publik itu sendiri maupun pemerintah seperti pencapaian target. Kinerja juga harus dinilai dari ukuran

eksternal seperti nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Adapun indikator akuntabilitas dalam penelitian ini diukur dari kesesuaian antara prinsip pelayanan yang dilaksanakan oleh Dekranasda Kota Pontianak, terhadap nilai dan norma yang ada dalam masyarakat meliputi transparansi pelayanan dan orientasi pelayanan dikembangkan guna memenuhi kebutuhan pelaku UMKM. Pola pelayanan yang akuntabel adalah yang mengacu pada kepuasan publik sebagai pengguna jasa.

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat diketahui bahwa pada dasarnya Pemerintah Kota Pontianak belum mengalokasikan dana untuk melakukan pengawasan dan pembinaan. Belum adanya alokasi dana dari pemerintah untuk pembinaan tentu berdampak pada pencapaian produktivitas organisasi, karena program yang telah direncanakan dan target organisasi memerlukan dana dalam realisasinya. Kendala yang dialami Dekranasda berpengaruh kepada pembinaan secara mandiri, dengan alasan minimnya dana dan digabungkan dalam pembinaan di Disperindag & UKM mengingat untuk efektivitas dan efisiensi tetap berdampak pada kurang optimal kinerja Dekranasda.

Dari pendapat yang disampaikan di atas, adanya dukungan namun belum optimal. Bantuan yang diberikan bersifat sementara dan tidak rutin ini menjadi

kendala Dekrnasda dalam melaksanakan kegiatan pembinaan. Namun akuntabilitas cukup baik, karena setiap bantuan dana hibah maupun bantuan sosial yang diberikan Pemerintah selalu dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan penjelasan diatas maka akuntabilitas Dekranasda Kota Pontianak dikatakan cukup baik. Hal mengindikasikan bahwa Dekranasda Kota Pontianak sudah berorientasi pada kepuasan masyarakat sebagai pengguna jasa. Hal ini terbukti dengan adanya pertanggungjawaban keuangan yang digunakan pada pembinaan ini menjadi contoh yang baik dalam tranparansi publik di Dekranasda.

## **E. KESIMPULAN**

1. Kesimpulan Produktivitas Dekranasda belum optimal, karena belum tercapainya target yang telah ditetapkan dan SDM yang menjadi pengurus Dekranasda belum menjalankan tugasnya dengan optimal karena terikat tugas utama sebaagi PNS, sehingga Dekranasda belum memiliki pola pembinaan secara mandiri.
2. Kesimpulan Responsivitas Dekranasda masih rendah, pemahaman masyarakat masih rendah tentang menyampaikan

kendala kepada UMKM dan pelaku UMKM mengalami kendala belum mengerti bagaimana cara menyampaikan permasalahannya.

3. Kesimpulan bahwa akuntabilitas Dekranasda cukup baik karena setiap bantuan dana dipertanggungjawabkan kepada pelaku UMKM dan Pemerintah yang memberikan bantuan kepada Dekranasda Kota Pontianak

## F. SARAN

1. Untuk meningkatkan produktivitas, Pengurus Dekranasda Kota Pontianak mengoptimalkan SDM yang dimiliki untuk mendata UMKM dan memberikan pembinaan kepada pelaku UMKM sehingga terwujud tujuan dan tercapainya produktivitas.
2. Untuk mendapatkan kepercayaan dari pelaku UMKM maka sikap responsivitas perlu ditingkatkan terutama pelaku yang mempunyai kendala. Dekranasda mengoptimalkan dalam memberikan penyuluhan kepada pelaku UMKM dan cara menyampaikan permasalahan kepada Dekranasda.
3. Untuk meningkatkan kinerja Dekranasda dalam pembinaan UMKM di Kota Pontianak perlu anggaran dana dari pemerintah.

## G. REFERENSI

### 1. Buku-Buku:

Dharma, Agus. 1991. *Manajemen prestasi kerja, pedoman praktis bagi para penyedia untuk meningkatkan prestasi kerja*. Cetakan kedua. Jakarta: Cv. Rajawali.

Dwiyanto, Agus. 2006, *Penilaian Kinerja Organisasi pelayanan Publik, makalah seminar kinerja organisasi sektor publik kebijakan dan persiapannya*. Yogyakarta: Jurusan IAN Fisipol UGM

Keban, T. Yeremias, 2005. *Kinerja Organisasi Publik*, Yogyakarta: Fisipol UGM

Mahmudi. 2007. *Manajemen kerja sektor publik*. Cetakan kedua (revisi) Yogyakarta: UPP STIM YKPN

Mahsun, Mohammad. 2006. *Pengukuran kerja sektor publik*. Yogyakarta :BPFE-Yogyakarta

Mangkunegara, A. A. Anwar Prabu. 2005. *Evaluasi kinerja SDM*. Bandung: PT. Refika Aditama

Margono, S. Agus & Kusumasari, B. 2015. *Manajemen Publik Kontemporer*. Yogyakarta: Gava Media.

Miftah Thoha, 1997, *Pembinaan Organisasi*. Jakarta : Mutiara Ilmu

Moleong, Lexy J. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya.

Pasolong, Harbani. 2010. *Teori Administrasi Publik*. Jakarta. Alfabeta

Payaman, Andi. 2005. *Manajemen personalia: Bandung: Remaja Rosdakarya*

Ratminto & Atik Septi Winarsih. 2013.  
*Manajemen Pelayanan*. Yogyakarta:  
Pustaka Pelajar

Ruky, Achmad S. 2001. *Sistem Manajemen Kerja*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Karya.

Subando A.M & Kusumasari.B.  
2015. *Manajemen Publik Kontemporer*.  
Yogyakarta. Penerbit Gava Media.

Sugiyono. 2013. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta

Tangkilisan, Russel S. Nogi 2005.  
*Manajemen Publik*. Jakarta: Grasindo

<http://kamusbahasaIndonesia.org/pembinaanKamusBahasaIndonesia.org> di akses pada Kamis 3 September 2015 Pukul 20:32

<http://jurnal.untan.ac.id/index.php/jpdpb/article/view/478> di akses pada Kamis 3 September 2015 Pukul 21: 05

<http://jurnafis.untan.ac.id/index.php/publika/article/view/610> di akses pada Rabu 20 Januari 2016 pukul 20:28

UU No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil Menengah di akses pada Senin 12 Oktober 2015 Pukul 21:09  
Perwali No. 270 Tahun 2012 Tentang Produk unggulan Kota Pontianak



KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
 UNIVERSITAS TANJUNGPURA  
 FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
 PENGELOLA JURNAL MAHASISWA  
 Jalan Prof. Dr. H. Hadari Nawawi, Pontianak Kotak Pos 78124  
 Homepage: <http://jurmafis.untan.ac.id>

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH / PUBLIKASI  
 KARYA ILMIAH UNTUK JURNAL ELEKTRONIK MAHASISWA

Sebagai sivitas akademika Universitas Tanjungpura, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap : Ropinus  
 NIM / Periode lulus : E.0110012 / III  
 Tanggal Lulus : 23 Maret 2016  
 Fakultas/ Jurusan : FISIP / IAN  
 Program Studi : Ilmu Administrasi Negara  
 E-mail address/ HP : Ropgen@gmail.com / 0812 5021 8991

demi pengembangan ilmu pengetahuan dan pemenuhan syarat administratif kelulusan mahasiswa (S1), menyetujui untuk memberikan kepada Pengelola Jurnal Mahasiswa publik.A.....\*) pada Program Studi Ilmu..... Administrasi..... Negara..... Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul\*\*):

Kinerja Dewan Kerajinan Nasional Daerah dalam Pembinaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kota Pontianak

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini, Pengelola Jurnal berhak menyimpan, mengalih-media/ format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/ mempublikasikannya di Internet atau media lain):

- Secara *fulltext*
- content* artikel sesuai dengan standar penulis jurnal yang berlaku.

untuk kepentingan akademis tanpa tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Pengelola Jurnal, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.



Mengetahui, disetujui  
 Pengelola Jurnal .....

Dr. A. N. M. AB  
 NIP. 19710502 199702 1 002

Dibuat di : Pontianak  
 Pada tanggal : 20 April 2016

NIM. E.01110012

Catatan :  
 \*tulis nama jurnal sesuai prodi masing-masing  
 (*Publika/Governance/Aspirasi/Sociodev/Sociologique*)

Setelah mendapat persetujuan dari pengelola Jurnal, berkas ini harus di scan dalam format PDF dan dilampirkan pada step4 upload supplementary sesuai proses unggah penyerahan berkas (submission author)